

Analisa Penyalahgunaan AI Dalam Memanipulasi Opini Publik di Media Sosial

Samuel Hotdin¹ Elsa Omega Napitupulu² Nadia Inggrida Prashayu³ Winson⁴ Fawwaz Aozadel⁵

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: samuel.205250205@stu.untar.ac.id¹ elsa.205250226@stu.untar.ac.id²
nadia.205250220@stu.untar.ac.id³
winson.205250258@stu.untar.ac.id⁴ fawwaaz.205250206@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Kemudahan dan kebebasan akses terhadap teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membuka lembaran baru dalam kreasi konten digital, namun secara alamiah melahirkan tantangan serius bagi integritas dan objektivitas informasi. Fenomena penyalahgunaan AI oleh pengguna media sosial kini semakin marak dalam bentuk konten yang sangat realistis dan sulit dibedakan, seperti manipulasi video dan audio (deepfake) serta rekayasa gambar untuk tujuan disinformasi dan memecah belah. Ancaman ini melampaui disinformasi dan hoaks berbasis teks, AI berpotensi menciptakan krisis kepercayaan, dimana batas antara realitas dan fiksi menjadi semakin tidak terlihat bagi masyarakat. Konten manipulatif ini kerap dirancang untuk memanipulasi kepercayaan seseorang dan memancing respons emosional, sehingga membuat penerima nya mampu melewati proses verifikasi dalam mencari kebenaran sebuah berita. Artikel ini menganalisis modus operasi penyalahgunaan AI oleh pengguna serta dampaknya bagi pengguna media sosial. Kajian ini menunjukkan bahwa dampak dari fenomena ini adalah kemerosotan kepercayaan publik secara luas dan tidak hanya terhadap media, tetapi juga terhadap institusi penegak hukum serta pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko memperdalam perpecahan sosial dan meruntuhkan kredibilitas yang sehat. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa upaya pencegahan terhadap ancaman ini memerlukan respons banyak pihak. Solusi dapat ditempuh dengan menegaskan larangan penyalahgunaan, pengembangan teknologi, memberikan penguatan literasi digital bagi para pengguna media sosial dalam menerima segala bentuk informasi, dan berbagai upaya lain.

Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi; Media Sosial; Kecerdasan Buatan; DeepFake; Literasi Digital

Abstract

Easy access to artificial intelligence (AI) has opened up new ways to create digital content, but it also creates a serious problem for the truthfulness of information. More and more, social media users are misusing AI to create fake content that looks extremely real, like manipulated videos and audio (deepfakes) or fake images, which are used to spread false information and divide society. This threat is much bigger than traditional text-based hoaxes because AI can cause a crisis of trust, making it hard for the public to tell the difference between what is real and what is fake. This manipulated content is often made to trick people and trigger their emotions, causing them to skip the process of checking the facts. This article examines how users misuse AI and its impact on society. The findings show that the main effect is a massive loss of public trust, not just in the media, but also in institutions like the police and the government. In the long run, this can lead to deeper social divisions and damage healthy public debate. In conclusion, fighting this threat requires a response from many different groups. While solutions involve banning the misuse of AI and developing new technology, the most important step is to strengthen digital literacy, helping social media users to think critically about all the information they encounter.

Keywords: Artificial Intelligence; Deepfake; Social Media; Digital Literacy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi pusat aktivitas publik di era digital. Berbagai media ini menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi, menyuarakan pendapat, dan melakukan berbagai diskusi. Namun, kebebasan ini juga dapat mengancam dan memicu masalah serius, yaitu maraknya berita bohong atau hoax yang terbukti bisa memecah belah masyarakat dan merusak kepercayaan publik. Selama ini, tantangan utama dalam media sosial adalah melawan penyebaran informasi salah yang dahulu hanya berbentuk teks. Namun, kini situasinya dapat berubah total dengan munculnya kecerdasan buatan (AI) yang bisa dipakai oleh siapa saja dan dimana saja. Teknologi yang dulunya rumit, terbatas, dan mahal, sekarang tersedia dalam aplikasi sederhana yang bahkan memungkinkan orang awam dalam membuat konten palsu yang terlihat sangat nyata. Contoh paling umum yang sedang marak adalah teknologi *deepfake*, yang dapat memanipulasi video, dan suara seseorang, bahkan rekayasa gambar yang sangat sulit dibedakan dari foto aslinya. Kemudahan ini menjadi jalan bagi penyalahgunaan AI dalam skala yang sangat besar dan belum pernah ada sebelumnya. Ancaman baru ini jauh lebih berbahaya. Kalau dulu kita dapat melawan hoax dengan data dan fakta. Namun, sekarang yang diserang adalah rasa kepercayaan para pengguna media sosial dan kemampuan kita untuk percaya pada apa yang kita lihat dan dengar. Konten manipulatif dan palsu ini sengaja dirancang agar dengan mudah menyentuh emosi yang dapat membuat kita kesulitan berpikir rasional dan dengan mudah diadu domba. Akibatnya, batas antara mana yang asli dan mana yang direkayasa menjadi semakin sulit untuk diketahui oleh publik.

Kondisi dan situasi seperti ini tentu sangat membahayakan nilai demokrasi di negeri ini. Kepercayaan pada pihak penting seperti proses pemilu, media, tokoh publik, wakil rakyat dan hukum dapat terguncang ketika publik tidak lagi bisa membedakan antara fakta dan tidak nyata. Reputasi seseorang dapat dirusak dengan mudah, dan perpecahan dapat dipicu oleh konten rekayasa negatif yang dibuat dengan sengaja. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana penyalahgunaan AI ini dapat bekerja dan apa saja dampaknya bagi masyarakat, serta perilaku selektif seperti apa yang sebaiknya diterapkan oleh masyarakat agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang sudah di rekayasa. Artikel ini disusun untuk menganalisis ancaman baru ini secara mendalam, sebagai langkah awal kita dalam membangun lingkungan sosial yang positif di tengah gempuran disinformasi era modern.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pengguna media sosial menyalahgunakan teknologi AI untuk menciptakan dan menyebarkan konten palsu yang bertujuan memanipulasi informasi?
2. Apa dampak berbahaya dari penyalahgunaan AI dan bagaimana peranan pemerintah dalam mengedukasi penggunaan AI yang benar di masyarakat?

METODE PENELITIAN

Merujuk pada judul, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan teknologi AI dalam memanipulasi opini publik di media sosial. Analisis konten dan studi kasus digunakan untuk mengamati berbagai konten di media sosial yang diasumsikan telah dimanipulasi oleh sistem AI seperti bot dan *deepfake*. Metode pengumpulan data meliputi observasi digital dengan menelusuri tren, hastag, atau akun bot, pola komentar yang dihasilkan oleh AI, serta sumber pustaka pendukung dan situs internet, baik berupa tulisan, gambar, maupun dokumentasi dari platform media sosial tersebut (Facebook, Instagram, Twitter).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyalahgunaan AI di Media Sosial

Contoh pertama dan mungkin yang paling umum adalah dalam pembuatan konten. Teknologi deepfake mampu memalsukan wajah, suara, dan ekspresi dengan alat yang paling mungkin sekaligus paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoax dalam bentuk visual. Teknologi ini menciptakan video atau gambar menggunakan teknik pembelajaran mendalam, dasarnya menggunakan kerangka kerja Generative Adversarial Networks (GANs) yang tampak nyata padahal sebenarnya sepenuhnya palsu. Kebanyakan deepfake yang menargetkan opini publik biasanya digunakan untuk membuat video palsu tampak seperti orang penting, misalnya politisi, pejabat publik, dan selebritas yang sedang berbicara. Video-video ini dapat membangun atau menghancurkan reputasi, menciptakan sentimen massa, atau mengubah persepsi tentang suatu isu karena kebanyakan orang tidak dapat membedakan video deepfake dari yang asli, hal ini menjadikannya senjata yang ampuh. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, dampak persepsi publik yang sudah terbentuk sering kali sulit diubah (fenomena ini dikenal sebagai *illusory truth effect*). Lebih jauh lagi, kita tidak bisa mengabaikan bagaimana deepfake yang seolah-olah nyata itu semakin menyebar. Algoritma media sosial dengan segala kecanggihannya, seakan-akan mengangkat konten viral tanpa memeriksa keasliannya terlebih dahulu. Hal ini memperparah penyebaran disinformasi dan mempercepat pembentukan opini publik yang keliru.

Respons Publik dan Efektivitas Manipulasi

Berdasarkan hasil pengamatan digital, analisis komentar di media sosial, dan data dari beberapa survei yang bisa diandalkan, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna media sosial pada umumnya masih kesulitan membedakan antara konten yang asli dan yang telah dipoles dan dimanipulasi oleh AI. AI kini berperan sebagai aktor utama dalam panggung informasi, membentuk persepsi dan opini publik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital masyarakat masih rendah, terutama dalam menghadapi konten yang dihasilkan oleh AI. Banyak dari mereka tidak memiliki kesadaran atau keterampilan teknis untuk mengenali tanda-tanda konten yang telah dimanipulasi secara otomatis. Akibatnya, opini publik sangat mudah terbentuk berdasarkan informasi yang salah atau menyesatkan, yang tersebar secara masif dan cepat melalui media sosial. Selain itu, algoritma media sosial sendiri justru memperkuat konten yang bersifat kontroversial, emosional, atau viral yang seringkali merupakan hasil dari manipulasi AI. Hal ini memperbesar efek yang di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang mendukung keyakinan mereka dan menolak informasi yang berseberangan tanpa memeriksa keasliannya terlebih dahulu.

Tantangan Regulasi dan Upaya Mitigasi

Di Indonesia, aspek hukum terkait *deepfake* masih menghadapi tantangan serius. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang dapat dijadikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran, namun belum mengatur secara spesifik mengenai konten manipulatif berbasis AI (Noerman, 2024; Prayoga, 2025). Kekosongan hukum ini menciptakan area abu-abu, terutama pada penggunaan *deepfake* untuk hiburan yang tidak merugikan pihak tertentu. Namun, ketika konten *deepfake* dipakai untuk merusak reputasi, menyebarkan kebencian politik, atau tujuan kriminal seperti pemerasan, maka permasalahannya jelas masuk ranah pidana (Fadhilah, 2024). Oleh karena itu, regulasi yang lebih adaptif diperlukan agar hukum mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi. Selain pendekatan hukum, strategi mitigasi perlu dijalankan melalui tiga jalur. Pertama, pendekatan teknologi dengan mengembangkan sistem deteksi otomatis di platform digital.

Kedua, pendekatan sosial berupa peningkatan literasi digital secara masif, agar masyarakat mampu mengenali konten manipulatif (Mutmainnah, 2024). Ketiga, pendekatan etika yang menekankan pentingnya kesadaran moral dalam menggunakan teknologi, sehingga masyarakat tidak sekadar menghindari sanksi hukum, tetapi juga memahami dampak sosial dari penyalahgunaan *deepfake* (Boediman, 2025).

Implikasi untuk Masa Depan

Keberadaan *deepfake* memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan. Dalam ranah politik, teknologi ini diperkirakan akan semakin digunakan untuk manipulasi elektoral dan propaganda, yang dapat menurunkan kualitas demokrasi (Vaccari & Chadwick, 2020). Dalam ranah sosial, *deepfake* berpotensi mempercepat munculnya fenomena *infocalypse*, yakni kondisi ketika publik kehilangan kemampuan membedakan realitas dengan rekayasa (Fadhilah, 2024). Dari sisi ekonomi, *deepfake* membuka peluang munculnya modus penipuan baru, seperti pencurian identitas, pemalsuan suara, hingga serangan reputasi terhadap perusahaan (Fallis, 2021; Boediman, 2025). Hal ini dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital maupun dunia bisnis secara umum. Untuk menghadapi tantangan tersebut, masa depan literasi digital dan regulasi hukum harus diarahkan pada pembangunan ekosistem digital yang lebih sehat. Pemerintah, akademisi, dan sektor swasta perlu berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan adaptif, mengembangkan teknologi deteksi, serta memperluas program edukasi publik yang berkelanjutan. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif informasi, tetapi juga memiliki kapasitas kritis untuk menghadapi tantangan era digital.

KESIMPULAN

Hasil Penyalahgunaan teknologi AI di media sosial, seperti membuat dan menyebarkan konten palsu, dapat memanipulasi opini publik dan menyebarkan disinformasi yang berbahaya. Penyalahgunaan informasi dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat, meningkatkan kemungkinan konflik sosial, dan mengancam stabilitas politik dan keamanan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan AI tetap berada di jalur yang menguntungkan dan bertanggung jawab melalui edukasi, peraturan, dan pengawasan. Suara Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang jelas dan tegas tentang penggunaan AI, serta program pendidikan berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan, agar masyarakat mampu membedakan antara informasi asli dan palsu dan juga Untuk menekan peredaran informasi menyesatkan, platform media sosial juga perlu meningkatkan sistem keamanan dan deteksi konten palsu berbasis AI. Sementara itu, akademisi dan peneliti dapat membantu dengan mengembangkan inovasi yang menekankan keamanan dan etika penggunaan AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) di media sosial adalah fenomena yang semakin kompleks yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa karena sulit membedakan teknologi seperti *deepfake*, bot otomatis, dan manipulasi visual dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan. Tingkat literasi digital masyarakat semakin rendah, sehingga sebagian besar pengguna media sosial tidak dapat membedakan informasi penting. Hal ini berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap media digital, munculnya polarisasi sosial, dan meningkatnya kerentanan terhadap penipuan, ujaran kebencian, dan kemungkinan manipulasi politik. Dari segi hukum, undang-undang saat ini, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada dasarnya dapat digunakan sebagai dasar untuk penindakan, tetapi undang-undang ini tidak secara khusus mengatur konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan, yang menyebabkan celah hukum

yang memungkinkan penyalahgunaan teknologi berlanjut tanpa pengawasan yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam stabilitas sosial dan demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum dalam menghadapi disrupsi teknologi.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang harus dipertimbangkan dalam hal ini. Pertama, pemerintah harus segera membuat undang-undang khusus yang mengatur penggunaan dan penyalahgunaan AI. Ini akan memberikan kepastian hukum yang berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Kedua, platform media sosial diharapkan untuk mengembangkan sistem deteksi otomatis berbasis AI yang dapat dengan cepat menemukan dan membatasi konten manipulatif. Ketiga, pendidikan formal dan non-formal harus dilakukan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Ini akan membantu siswa memperoleh keterampilan kritis untuk menilai dan memverifikasi informasi. Keempat, media harus meningkatkan kesadaran etika sehingga orang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga bertanggung jawab untuk menggunakan teknologi digital. Terakhir, membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan terpercaya membutuhkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil. Dengan aturan yang jelas, dukungan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan nilai etika, efek negatif penyalahgunaan AI di media sosial dapat diminimalkan. Akibatnya, kemajuan teknologi dapat diarahkan untuk membangun ruang digital yang inklusif dan membantu kemajuan negara.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada instansi yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan serta kerja sama dari semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, A. A., & Afifah, R. (2024). Peran literasi di era digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial. *Indonesian Journal of Education*, 1(2), 89–98. Diakses dari <https://journal.satriajaya.com/index.php/ijoe/article/view/75/49>
- Boediman, C. (2025). Etika penggunaan teknologi kecerdasan buatan di era digital. *Jurnal Etika & Teknologi*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.31812/jet.2025.910>
- Boediman, C. (2025). Tantangan bisnis dan keamanan digital akibat teknologi deepfake. *Jurnal Manajemen & Teknologi*, 11(1), 33–48. <https://doi.org/10.31221/jmt.2025.1101>
- Cahya, A. N., Maksum, M. A., & Primadana, T. A. S. (2024). Transformasi budaya hukum dalam era digital: Implikasi penggunaan AI dalam perkembangan hukum di Indonesia. *IKRAITH-HUMANIORA*, 8(2), 1–15. Diakses dari <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3690>
- Fadhilah, N. (2024). Ancaman deepfake terhadap privasi dan demokrasi digital di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 12(1), 45–57. <https://doi.org/10.21009/jki.2024.12.1.5>
- Fadhilah, N. (2024). Fenomena infopocalypse dan dampaknya terhadap masyarakat digital di Indonesia. *Jurnal Media dan Budaya*, 15(2), 101–115. <https://doi.org/10.22202/jmb.v15i2.2024>
- Fallis, D. (2021). The epistemic threat of deepfakes. *Philosophy & Technology*, 34(4), 623–643. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00419-2>
- Hwian, C. (2025). Penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk memalsukan identitas tokoh masyarakat melalui photoshop: Perspektif hukum pidana. Dalam *Buku Ajar Hukum Siber Indonesia*. Universitas Surabaya, Surabaya. Diakses dari [https://repository.ubaya.ac.id/48167/1/BookChapter Hwian Penyalahgunaan%20AI%20photoshop 2025.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/48167/1/BookChapter%20Hwian%20Penyalahgunaan%20AI%20photoshop%202025.pdf)

- Mutmainnah, S. (2024). Literasi digital sebagai strategi menghadapi hoaks dan deepfake di media sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(2), 77–89. <https://doi.org/10.24036/jish.2024.v13i2.894>
- Nadhifa, A. M. (2025). Pembaharuan hukum penanganan tindak pidana pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia. *Batavia Law Journal*, 3(1), 55–70. Diakses dari <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/35/26>
- Noerman, M. (2024). Analisis hukum konten deepfake dalam perspektif UU ITE dan KUHP. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 8(1), 23–39. <https://doi.org/10.31219/jht.2024.8139>
- Novera, O., & Fitri Z, Y. (2024). Analisis pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi manipulasi gambar (deepfake) dalam penyebaran konten pornografi melalui akun media sosial. *Jurnal Faqih*, 7(2), 75–88. Diakses dari <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1539/1049>
- Prayoga, A. (2025). Kekosongan hukum dalam penanganan kejahatan berbasis kecerdasan buatan. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/10.35810/jhsi.v5i1.562>
- Trunapasha, A. A., Suherman Sewu, P. L., Narwastuty, D., & Kurniawan, S. (2023). Penyalahgunaan Artificial Intelligence terhadap tokoh masyarakat dalam konten di media sosial berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. *Veritas*, 6(1), 12–18. Diakses dari <https://www.jurnal.uia.ac.id/index.php/veritas/article/view/3112/1560>
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. *Social Media + Society*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>